

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, 2017, *Laporan Tahunan 2016*, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Hartini, Sri dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, 2004, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jeddawi, Murtir, 2009, *Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2015, *Buku Profil Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ridwan. HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung
- Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, *Pelayanan Publik (Perizinan/Non Perizinan) Bidang Perhubungan*, 2016, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sirajudin dkk, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.
- Soedjono D, 1977, *Pungli Analisa & Kriminologi*, cv. Sinar Baru, Bandung.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukardja, Ahmad 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perpesktif Fikih Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Waluyo, Bambang 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Ramadhani, Wahyu “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik”. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 12, Nomor 2, Juli-Desember, 2017

C. Hasil Penelitian

- Amirah, Atikah, 2016, *Fenomena Pungutan Liar Di Pasar Tanah Abang Sebagai Sebuah Budaya Kejahatan*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok
- Muttaqin, M. Alif, 2018, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Keimigrasian dalam Pembuatan Paspor Pasca Dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Setiawan, Sutri Bagus, 2002, *Pungutan Liar Oleh Polri di Samsat Polda "X"*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.

Wirawan, Jatmiko, 2017, *Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelapor*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

D. Makalah/Pidato

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, "Satgas Saber Pungli", *Makalah*, Rapat Koordinasi Persiapan KPK, Jakarta, 23 November 2016.

Widiyanto P, "Satgas Saber Pungli dan Pelaksanaan OTT", *Makalah*, Sosialisasi Satgas Saber Pungli dan Pelaksanaan OTT, Jakarta, 25 Januari 2017.

E. Artikel Internet

Amelia R, Mei, "Begini Kronologi OTT Pungli 3 PNS di Kemenhub", <https://news.detik.com/berita/d-3319331/begini-kronologi-ott-pungli-3-pns-di-kemenhub>.

Anonim, <http://teknispendidikan.net/2016/09/04/prinsip-prinsip-kepemerintahan-yang-baik/>.

Madril, Oce "Paket Kebijakan Antikorupsi Jokowi", <https://indonesiana.tempo.co/read/106352/2017/01/03/Paket-Kebijakan-Antikorupsi-Jokowi~Oce-Madril>.

Nugroho, Ferli Sandi "Reformasi Hukum Di Indonesia", <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=92568&val=4997>.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Tugas dan Fungsi", <http://dephub.go.id/ppid/kementerian/56>.

Satgas Saber Pungli, "Tentang Saber Pungli", <https://saberpungli.id/faq>.

Satria, Ase, “Materi Pelayanan Publik”,
<http://www.materibelajar.id/2016/01/materi-pelayanan-publik-teori-pelayanan.html#>.

Supriyono, Muhammad, “Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)”,
<https://magipendidikan.wordpress.com/2009/03/20/konflik-kepentingan-conflict-of-interest/>.

Surjaya, Abdullah M, “Diperas, Pengusaha *Ngadu* Ke DPRD Bekasi”,
<https://metro.sindonews.com/read/754652/31/diperas-pengusaha-ngadu-ke-dprd-bekasi-1372315035>.

Widi K, Nograhani, “PPNS Kemenhub Tangkap Tangan 3 Orang Terkait Pungli di Tanjung Priok”, <https://news.detik.com/berita/d-3361036/ppns-kemenhub-tangkap-tangan-3-orang-terkait-pungli-di-tanjung-priok>.

Yadiman, “Reformasi Hukum dan Birokrasi”,
<https://buanajurnal.wordpress.com/2013/06/28/reformasi-hukum-dan-birokrasi-dr-drs-h-yadiman-sh-mh/>.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (KUHP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksanaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 67), (Tambahkan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang
Ombudsman Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 139), (Tambahkan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4899)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112), (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150),
(Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 99 Tahun
2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun
2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 625
Tahun 2016 tentang Satgas Operasi Pemberantasan Pungli di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 593
Tahun 2017 Tentang Unit Satuan Tugas Operasi Pemberantasan
Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

G. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Kun Wardana selaku Wakil Sekretaris Satgas Saber Pungli pada 22 September 2017, pukul 10.00 WIB dan pada 1 Februari 2018 pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Darma Sanjaya selaku Anggota Sekretariat Satgas OPP Kemenhub pada 2 Februari 2018 pukul 10.00 WIB

Hasil wawancara dengan Nuris Rochmandi selaku Sekretariat Satgas OPP Kemenhub pada 12 April 2018, Pukul 09.00 WIB